

Research Article

Implementation of Education Policy to Support Vision and Mission at MIS Ummul Quraa Tembung, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province

Tengku Darmansyah

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

E-mail: tengkudarmansah@uinsu.ac.id

Akbar Rafsanjani

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

E-mail: akbarafsanjani3@gmail.com

Khoirun Nisa

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

E-mail: nisak0975@gmail.com

Salwa Nabila Damanik

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

E-mail: salwadm712@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by Quality, Journal of Education, Arabic and Islamic Studies.

Received : December 29, 2024

Revised : January 15, 2025

Accepted : January 30, 2025

Available online : February 11, 2025

How to Cite: Tengku Darmansyah, Akbar Rafsanjani, Khoirun Nisa, & Salwa Nabila Damanik. (2025). Implementation of Education Policy to Support Vision and Mission at MIS Ummul Quraa Tembung, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Quality : Journal Of Education, Arabic And Islamic Studies*, 3(1), 66–73. <https://doi.org/10.58355/qwt.v3i1.91>

Abstract

In preparing policies relating to education in In Indonesia, education tends to be interpreted as a conscious effort to help develop the personality and abilities of students. Management unprofessional madrasahs can hinder the progress of the madrasah To carry out its function as a formal educational institution, a plan is needed strategic as an effort or way to control the school effectively effective and efficient. The components in strategic planning consist of at least: of the vision, mission, goals, objectives and strategies must be carried out by the manager madrasahs, so that madrasahs have a policy direction that can support them achieving the expected goals. This research aims to describe education policy to support the vision and mission of the Ummul Quraa private Madrasah Ibtidaiyah. The method used in the research is qualitative descriptive. The research design used is a case study with observing policies at the private Ummul Quraa Madrasah Ibtidaiyah This research uses observation, interview and data collection techniques documentation.

The party participating in this research was the chairman of the foundation and the head of the private Ibtidaiyah madrasah Ummul Quraa. That policy is the goal to improve raw materials, namely teachers, students and also facilities the infrastructure. Application of vision and mission.

Keywords: Education Policy, Vision, Mission.

Implementasi Kebijakan Pendidikan untuk Mendukung Visi dan Misi di MIS Ummul Quraa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan di Indonesia ini, pendidikan cenderung diartikan sebagai usaha sadar untuk membantu perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik. Pengelolaan madrasah secara tidak profesional dapat menghambat langkah madrasah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal, dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya atau cara untuk mengendalikan sekolah secara efektif dan efisien. Komponen dalam perencanaan strategis paling tidak terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tersebut harus dilakukan oleh pengelola madrasah, agar madrasah memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan pendidikan untuk mendukung visi dan misi di Madrasah ibtidaiyah swasta Ummul quraa I, Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan mengamati kebijakan di Madrasah ibtidaiyah swasta Ummul quraa Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Pihak yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah ketua yayasan dan kepala madrasah ibtidaiyah swasta Ummul quraa Kebijakan itu tujuannya untuk meningkatkan bahan baku yaitu guru, peserta didik dan juga fasilitas sarana prasarannya. Pengaplikasian visi dan juga misi.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Visi, Misi.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses sosial untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan generasi yang dahulu kegenerasi selanjutnya agar nilai-nilai pendidikan tersebut tetap terpelihara dan terjaga bahkan butuh dikembangkan. Dengan demikian, keberadaan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan peran pemerintah sebagai penguasa. Hal ini karena kompleksitas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sangat beragam dan membutuhkan campur tangan pemerintah. Disamping itu masyarakat memiliki keterbatasan, sedangkan pemerintah memiliki kekuasaan dan kekuatan yang dapat menjamin keberadaan dan keberlangsungan pendidikan. Tidak menutup kemungkinan apabila proses penyelenggaraan pendidikan diwarnai berbagai macam konflik dan pertentangan serta dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang sulit ditangani oleh masyarakat sehingga intervensi pemerintah berupa kebijakan yang diharapkan menjadi solusi terbaik (Ahmad, 2015).

Dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan di Indonesia dewasa ini, pendidikan cenderung diartikan sebagai usaha sadar untuk membantu perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan. Secara lebih umum, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pembimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh pendidik kepada peserta didik kearah suatu

tujuan tertentu (Engkoswara & Komariah, 2015).

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah system pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, memerhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan desentralisasi di bidang pendidikan tidak hanya terhenti pada tingkat kabupaten dan kota tetapi lebih jauh yaitu sampai pada tingkat sekolah. Dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan kelevel sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya.

Otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat. Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi agar mereka lebih memahami kompleksitas pendidikan, membantu serta turut mengontrol pengelolaan pendidikan.

Adapun kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula mendapat perhatian oleh sekolah. Dengan demikian, sekolah dituntut memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah, karena keduanya merupakan penyelenggara pendidikan di sekolah (Hasbullah, 2010).

Pengelolaan sekolah secara tidak professional dapat menghambat langkah sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal, dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya atau cara untuk mengendalikan sekolah secara efektif dan efisien. Komponen dalam perencanaan strategis paling tidak terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi. Perumusan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tersebut harus dilakukan pengelola sekolah, agar sekolah memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang mengungkapkan tentang keadaan atau situasi subyek yang diteliti sesuai dengan fakta saat penelitian dilakukan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dalam mendukung visi dan misi di Madrasah ibtidaiyah swasta ummul quraa. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada setting (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi yang berperan serta (participan observation), wawancara (interview), dan dokumentas (Sugiono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (city) (Alfirzan, dkk, 2021). Dapat

ditambahkan, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (city). Dapat ditambahkan, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam organisasi hal ini terkait dengan kebijakan pendidikan di sekolah.

Dalam mengelola satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis tentunya merupakan tanggung jawab menteri sebagai system pendidikan nasional memerlukan kebijakan untuk mampu menciptakan masa depan yang lebih baik. Menciptakan kebijakan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan sehingga mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bertanggung jawab membangun bangsanya (Solichin, 2015).

Kebijakan pendidikan merupakan suatu pertimbangan yang didasarkan atas system nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.

Oleh sebab itu sekolah sebagai lembaga atau organisasi yang melaksanakan pendidikan formal sebagai system pendidikan nasional, harus mampu berperan dalam menentukan masa depan generasi muda (Nasihi & Apsari, 2022). Dalam pelaksanaan system pendidikan diperlukan kebijakan dalam meningkatkan mutu diperlukan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan keperluan peningkatan mutu sekolah karena di dalamnya berkenaan dengan proses pembudayaan. Proses pembudayaan maksudnya ialah proses memanusiakan anak sehingga potensinya menjadi actual dalam kematangan dan kemandirian hidupnya. Suatu proses yang mampu memenuhi pendidikan anak sebagai kebutuhan dasar bagi setiap warga negara.

Visi dan Misi

Visi adalah idealisasi pemikiran tentang masa depan organisasi yang merupakan kekuatan kunci bagi perubahan organisasi yang menciptakan budaya dan perilaku organisasi yang maju dan antisipatif terhadap persaingan global sebagai tantangan zaman

Visi ditulis sebagai kata benda yang merupakan konsep keadaan organisasi di masa depan. Smith mengartikan visi kurang lebih sebagai wujud masa depan yang mengendalikan rencana strategis. Dengan kata lain, visi merupakan cita-cita organisasi yang diharapkan (Bakry, 2010).

Misi merupakan alasan atau sebab-sebab mengapa sebuah organisasi harus ada. Achmad Djunaedi berpendapat bahwa misi menunjukkan apa yang dilakukan atau daftar dan karakteristik layanan yang diberikan. Dengan demikian, misi ditulis sebagai kata kerja.

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada saat ini dan dimasa yang akan datang (Hafizin & Herman, 2022). Oleh karena itu, misi harus mencerminkan tentang segala sesuatu untuk bisa mencapai visi, atau dengan kata lain misi adalah penjabaran realistis yang bisa dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi

Visi merupakan cita-cita sekolah sedangkan misi merupakan program untuk mewujudkan visi tersebut. Visi sekolah yaitu tujuan sekolah jangka panjang, bisa lima atau sepuluh tahun kedepan. Untuk mewujudkan visinya, sekolah menyusun misi yang berisi sejumlah program dan kegiatan jangka pendek dan menengah. Visi disusun sesuai kemampuan sekolah, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan tuntutan masyarakat. Secara bertahap visi sekolah harus mengalami kemajuan dan peningkatan sebagai bukti bahwa sekolah bergerak maju bukan stagnan apalagi mundur.

Visi memotivasi warga sekolah dalam bekerja, melaksanakan program rutin dan program pengembangan. Jika warga sekolah dalam bekerja, melaksanakan program rutin dan program pengembangan. Jika warga sekolah tidak ikhlas dan baik dalam bekerja, maka program tidak akan terlaksana dengan baik, dan berakibat pada kegagalan pencapaian visi sekolah.

Oleh karena itu, visi dan misi sekolah harus dipahami dengan baik oleh setiap warga sekolah mulai dari pimpinan sampai kepada staf terbawah. Seorang pemimpin atau kepala sekolah harus mampu memberikan pemahaman mengenai visi yang hendak dilaksanakan kepada seluruh warga sekolah karena visi dan misi dibuat bukan hanya kepentingan kepala sekolah saja melainkan untuk seluruh warga sekolah. Bersosialisasi tidak cukup hanya dilakukan sekali atau dua kali melainkan harus berkali-kali agar warga sekolah paham betul dan mampu bekerja pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan dari perumusan visi tersebut.

Dalam Al-Qur'an, ayat yang menjelaskan tentang visi dan misi adalah ayat yang selalu dibaca dalam doa yaitu surah Al-Baqarah: 201.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka" (QS. Al-Baqarah: 201)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dalam jangka panjang akhirat sebagai visi hidup sedangkan dunia sebagai misi untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat atau di surga.

Visi seorang muslim adalah ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Visi tersebut tidak dapat terealisasi tanpa adanya misi. Misi seorang muslim di dunia untuk mewujudkan visinya adalah dengan beriman kepada Allah SWT karena sebaik-baik amal dan iman adalah kepada Allah SWT (Pramitha, 2017).

Kebijakan Pendidikan dalam Mengaplikasikan Visi dan Misi

Kebijakan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan sangat menentukan arah serta jalur dalam proses itu sendiri. Karena langkah dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pendidikan yang akan diambil, maka hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah.

Dalam pengambilan keputusan oleh kepala sekolah atau peminan sekolah hendaknya memperhatikan beberapa factor lingkungan eksternal, input, proses, output, dan umpan balik. Berkaitan dengan hal tersebut maka kebijakan dapat dipandang sebagai pedoman untuk bertindak dan sebagai bantuan bagi pengambilan keputusan (Hafizin & Herman, 2022).

Visi dan misi merupakan hal yang mutlak adanya di dalam lembaga pendidikan formal karena visi dan misi adalah imajinasi moral yang mencerminkan profil sekolah yang diinginkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam pengaplikasian visi dan misi yang telah dirumuskan merupakan cita-cita atau suatu rencana jangka panjang yang hendak dicapai maka membutuhkan kebijakan sebagai pedoman dalam setiap proses pelaksanaannya.

Kebijakan pendidikan memainkan peran yang sangat strategis dalam membangun kualitas sekolah. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan tidak hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang memberikan arah bagi seluruh kegiatan pendidikan di sekolah. Setiap keputusan yang diambil oleh kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan sangat bergantung pada kebijakan yang telah dirancang sebelumnya. Keputusan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas pendidikan, penerapan kurikulum, serta pengelolaan anggaran sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu memiliki kemampuan analisis yang baik dalam memahami kebutuhan lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar sehingga kebijakan yang diterapkan benar-benar relevan dan bermanfaat. Tanpa kebijakan yang matang, keberlangsungan proses pendidikan dapat terganggu, dan hal ini berpotensi menurunkan kualitas output pendidikan yang dihasilkan (Annor, 2022).

Dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah perlu mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi kondisi sosial masyarakat, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, hingga kebutuhan dunia kerja. Di sisi lain, faktor internal mencakup kualitas input pendidikan, seperti kompetensi guru, motivasi siswa, serta infrastruktur sekolah. Selain itu, proses pembelajaran juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Untuk merealisasikan visi dan misi sekolah, dibutuhkan kebijakan yang konkret dan terukur. Kebijakan ini harus dirancang berdasarkan analisis kebutuhan serta melibatkan partisipasi dari berbagai pihak. Sebagai contoh, jika

sebuah sekolah memiliki visi untuk menjadi sekolah yang ramah lingkungan, maka kebijakan yang diterapkan dapat mencakup program penghijauan sekolah, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan pembelajaran yang berorientasi pada pendidikan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan laporan hasil penelitian, maka penelitian mengenai Kebijakan Pendidikan untuk mendukung Visi dan Misi di Madrasah ibtidaiyah swasta ummul quraa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan di MIS Ummul Quraa untuk guru mereka menentukan selain alumni. Visi dan misi merupakan profil sekolah yang diinginkan dimasa yang akan datang. Untuk mengaplikasikan visi misi madrasah memasukkan materi keagamaan.
2. Kebijakan telah diuji coba dilapangan karena kepala madrasah membuat kebijakan sudah berdasarkan renstra dan renstra berdasarkan analisis SWOT, analisis SWOT itu sudah berdasarkan fakta dilapangan. Perlu diuji di lapangan itu jika kita belum tahu kondisi di madrasah seperti apa atau sekolah yang baru saja dibangun. Sedangkan kepala madrasah sendiri sudah tahu keadaan di madrasah seperti apa.
3. Evaluasi dilakukan secara berkala, evaluasi dilakukan setiap akhir tahun ajaran karena dari evaluasi akan nampak apakah ada kendala-kendala dari kebijakan sebelumnya, maka setelah itu perlu adanya perbaikan untuk kebijakan di tahun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Alfirzan, A., Nasri, Y., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Pendidikan serta Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1521-1529.
- Annor, M. F. (2022). Manajemen Kebijakan Pendidikan dalam Pengaplikasian Visi dan Misi di Madrasah Aliyah Manbaul Ulum Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1-13.
- Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Hafizin, H., & Herman, H. (2022). Merumuskan visi dan misi lembaga pendidikan. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(01), 99-110.
- Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Nasihi, A., & Hapsari, T. A. R. (2022). Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. *Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL)*, 1(1), 77-88.

- Pramitha, D. (2017). Urgensi perumusan visi, misi dan nilai-nilai pada lembaga pendidikan Islam. *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islami*, 1(1), 45-52.
- Solichin, M. (2015). Implementasi kebijakan pendidikan dan peran birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148-178.
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013.